

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Infrastruktur Kota Padang merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa lalu lintas dan angkutan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan nyaman serta terjangkau oleh masyarakat Kota Padang serta pemberdayaan teknologi informasi yang terpadu, dengan indikator meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, penyedia dan pengguna jasa serta sumber daya lainnya di bidang perhubungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD juga merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran

tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/ harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Pemerintah Kota Padang mempunyai peran penting dalam pengalokasian dana anggaran pembangunan dan mengetahui perkembangan dana yang terjadi di setiap wilayah dan Kota Padang pada khususnya, maka perlu untuk kita mengetahui perkembangan dan penggunaan anggaran tersebut. Dalam hal ini difokuskan pada perkembangan dan penggunaan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

Perkembangan dana anggaran tersebut harus diketahui apakah digunakan oleh pemerintah Kota Padang dengan baik dan bijak. Setiap perkembangan yang terjadi seharusnya dapat meningkatkan pelayanan yang telah dianggarkan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang. Dengan mengetahui dana anggaran, perkembangan, serta penggunaannya maka kita dapat mengalokasikannya pada tempatnya sesuai dengan kebutuhannya dengan jelas.

Penggunaan anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang sangat banyak dan beragam sehingga penggunaan anggaran tersebut harus diketahui dengan rinci kemana arah anggaran tersebut. Dengan mengetahui penggunaan anggaran yang lebih rinci dapat mengantisipasi penyimpangan dan dapat memperbaiki serta mengalokasikan dananya kearah yang lebih tepat dan lebih membutuhkan.

Penggunaan anggaran tersebut juga dapat bermanfaat kedepannya untuk mengetahui dan mengambil keputusan serta kebijakan yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan kegiatan magang di Bappeda Kota Padang untuk dapat mengetahui perkembangan dan penggunaan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang dengan mengangkat judul **“ANALISIS PERKEMBANGAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG TAHUN 2012 – 2014 “**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah perkembangan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2012-2014 ?
2. Bagaimanakah penggunaan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2012-2014 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

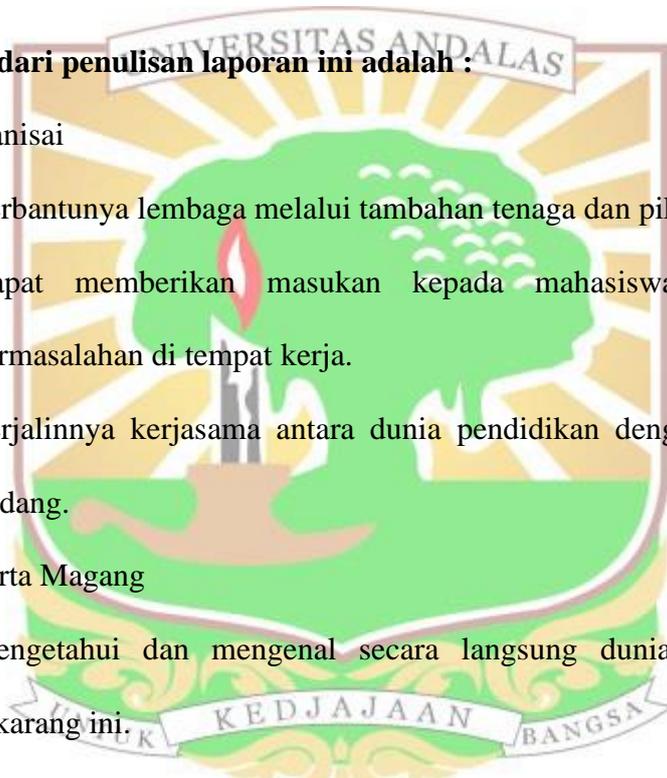
Berdasarkan uraian di atas, adapun tujuan dari kegiatan magang ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2012 – 2014
2. Untuk mengetahui penggunaan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang Tahun 2012 - 2014.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

**Manfaat dari penulisan laporan ini adalah :**

1. Bagi Organisasi
  - a. Terbantunya lembaga melalui tambahan tenaga dan pikiran.
  - b. Dapat memberikan masukan kepada mahasiswa apabila terjadi permasalahan di tempat kerja.
  - c. Terjalinnya kerjasama antara dunia pendidikan dengan Bappeda Kota Padang.
2. Bagi Peserta Magang
  - a. Mengetahui dan mengenal secara langsung dunia kerja pada saat sekarang ini.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang dunia kerja.
  - c. Membantu dan melatih cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan kerja.
  - d. Untuk memenuhi mata kuliah magang dan menyelesaikan salah satu syarat Studi Keuangan Negara dan Daerah Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.



- e. Terlatih untuk mensosialisasikan diri dengan berbagai macam karakter dan kepribadian serta disiplin ilmu yang berbeda.

### 3. Bagi Pembacas

- a. Mengetahui peran Bappeda dalam merencanakan pembangunan di wilayah Kota Padang
- b. Dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam dunia kerja sehingga dapat membekali mahasiswa dengan pengetahuan yang telah diketahui.
- c. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai proses penyusunan anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.



### 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan selama 40 hari kerja yaitu dari tanggal 2 Maret s/d 30 April 2015 di kantor Bappeda Padang.

### 1.6 Sistematika Laporan Magang

Untuk lebih terarahnya penulisan laporan magang, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima Bab yaitu :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup magang, metode penulisan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menjelaskan pengertian anggaran, tahap penyusunan anggaran, landasan hukum perencanaan dan penganggaran, fungsi dan manfaat anggaran.

## **BAB III GAMBARAN UMUM KOTA PADANG DAN BAPPEDA KOTA PADANG**

Dalam bab ini berisikan uraian secara umum tentang Kota Padang dan Bappeda Kota Padang, mengenai sejarah berdirinya, visi misi, struktur organisasi dan kegiatannya.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan perkembangan dan penggunaan anggaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bagian ini dituliskan daftar bacaan yang digunakan penulis untuk melengkapi tulisan.

